



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK DAERAH KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

YOHAN DWI ARTHA

NIM 110810101079

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Progran Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

SKRIPSI

Oleh

YOHAN DWI ARTHA

NIM 110810101079

**JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang tidak terhingga atas terselesaikannya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Teristimewa Ayahanda Suratno dan Ibunda Sriati tercinta, tersayang, terkasih, dan yang terhormat. Kupersembahkan sebuah tulisan dari didikan kalian yang kuaplikasikan dengan ketikan hingga menjadi barisan tulisan dengan beribu kesatuan, berjuta makna kehidupan, tidak bermaksud yang lain hanya ucapan TERIMA KASIH yang setulusnya tersirat dihati yang ingin ku sampaikan atas segala usaha dan jerih payah pengorbanan untuk anakmu selama ini;
2. Untuk yang kusayangi dan yang kuhormati seluruh guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu
adalah untuk dirinya sendiri
(QS *Al-Ankabut* ayat 6)

”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain),
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”
(QS. *Alam Nasyrah* :6-8)

“Ilmu ada tiga tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan
sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, ia akan tawadu’. Dan jika memasuki
tahapan ketiga, dia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya.”
(Umar bin Khattab)

PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YOHAN DWI ARTHA

NIM : 110810101079

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN JEMBER” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Jember, 16 Februari 2016

Yang Menyatakan

Yohan Dwi Artha

NIM 110810101079

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Oleh
YOHAN DWI ARTHA
NIM 110810101079

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Badjuri, ME

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Zainuri, M. Si

PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menyetujui:

Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN JEMBER

Nama Mahasiswa : Yohan Dwi Artha

NIM : 110810101079

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Regional

Tanggal Persetujuan : 16 Februari 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Badjuri, ME

NIP. 195312251984031002

Dr. Zainuri, M. Si

NIP. 196403251989021001

Ketua Jurusan IESP

Dr. Sebastiana Viphindartin, M. Kes

NIP. 19641108 198902 2 001

**PENGESAHAN
JUDUL SKRIPSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Yohan Dwi Artha

NIM : 110810101079

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

4 Maret 2016

dan telah dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Drs. Agus Luthfi, M.Si.
NIP. 196505221990021001 (.....)
2. Sekretaris : Dra. Nanik Istiyani, M.Si
NIP. 196101211987022002 (.....)
3. Anggota : Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes.
NIP. 196411081989022001 (.....)

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Foto 4 X 6
warna

Dr. Mochammad Fathorrazi, SE., M.Si
NIP. 19630614 199002 1 001

*ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK
DAERAH KABUPATEN JEMBER*

Yohan Dwi Artha

*Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Jember*

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah perlu dilaksanakan sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan. Dengan sumber dana yang memadai, diharapkan proses pembangunan di daerah dapat terlaksana dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda (*Multiple Linier Regression Method*) dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square (OLS)*, jenis data yang digunakan adalah data sekunder meliputi jumlah penduduk, PDRB, inflasi tahun 1984-2013. Hasil analisa data dengan regresi linier berganda diperoleh hasil variabel jumlah penduduk dan PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, dan variabel inflasi memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Kata kunci: pajak daerah, jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING TAX REVENUE DISTRICT JEMBER

Yohan Dwi Artha

*Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics,
University of Jember*

ABSTRACT

Taxes are one source of regional revenue (PAD), the largest. Efforts of local government to increase the regional tax revenue need to be implemented as one source of financing for development. With a adequate funding sources, it is expected the development process in the area can be accomplished and well-being of society as a whole will increase. This research aimed to know the the effect of the total population, of PDRB and inflation on the regional tax revenue Jember. The method used is multiple linear regression (Multiple Linear Regression Method) by the least squares method or ordinary least squares (OLS), the type of data used is secondary data include population, PDRB, inflation in 1984-2013. The results of the data analysis with multiple linear regression obtained variable results of the population and PDRB has a positive and significant impact on the the regional tax revenue, and variable inflation has a negative but insignificant effect on the regional tax revenue.

Keywords: regional taxes, total population, PDRB, and inflantion.

RINGKASAN

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember; Yohan Dwi Artha; 110810101079; 2016; Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dapat dipandang dari berbagai aspek dan sudut pandang. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Dari sudut pandang hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara tersebut. Dari sudut pandang keuangan, pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara.

Kegiatan ekonomi pada setiap daerah kabupaten atau kota yang bervariasi dalam setiap pengembangan potensi ekonominya diperlukan pembangunan daerah yang terpadu dan serasi, serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung pada setiap daerah benar-benar sesuai dengan proporsi dan potensi yang dimiliki. Untuk itu pemerintah memberlakukan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan

daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diharapkan dengan diberlakukannya UU tentang desentralisasi fiskal daerah atau kabupaten dapat lebih mandiri dalam mengurus keuangan rumah tangganya serta dapat memaksimalkan seluruh potensi yang ada termasuk penerimaan pajak daerah.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, PDRB dan tingkat inflasi tahun 1984-2013. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda (Multiple Linier Regression Method) dengan metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square (OLS).

Hasil estimasi regresi linier berganda tingkat signifikansi variabel jumlah penduduk adalah sebesar $0,0035 < \alpha = 5\%$ yang artinya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Tingkat signifikansi variabel PDRB adalah sebesar $0,0000 < \alpha = 5\%$ yang artinya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Dan tingkat signifikansi variabel inflasi adalah sebesar $0,3271 < \alpha = 5\%$ yang artinya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Dari hasil estimasi regresi linier berganda pada diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 82,38165 dengan tingkat probabilitas F_{hitung} sebesar 0,000000, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Karena nilai probabilitas $F_{hitung} < \text{level of signification } (\alpha = 0,05)$, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (simultan) dari variabel bebas yaitu jumlah penduduk, PDRB dan tingkat Inflasi secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Nilai koefisien determinasi dari estimasi linier berganda adalah sebesar 0,908137 atau 90,8137%. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan variabel bebas (jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi) secara bersama-sama mampu menerangkan variabel dependen (penerimaan pajak daerah) sebesar 90,8137% sedangkan selebihnya (9,1863%) diterangkan oleh variabel lain diluar model yang telah digunakan.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Pentusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa motivasi, nasehat, saran maupun kritik yang membangun. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Badjuri, ME selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Zainuri, M. Si Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Dr. Siti Komariah, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
3. Dr. Sebastiana Viphindartin, M. Kes selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan;
4. Dr. Mochammad Fathorrazi, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
6. Orangtuaku, Ibunda Sriati dan Ayahanda Suratno serta kakakku Desi Ratna Sulistyowati, atas doa, dukungan, kasih sayang, selama pelaksanaan hingga terselesaikannya skripsi ini;
7. Kekasihku Silfani Adita Putri yang senantiasa memberi semangat, motivasi dan mendukung selama ini;

8. Teman-teman IESP 2011 maupun konsentrasi regional yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan, persahabatan, dan kasih sayang yang tak mungkin terlupakan;
9. Seluruh staff karyawan Fakultas Ekonomi dan staff Perpustakaan Fakultas maupun Perpustakaan Pusat yang telah mempermudah dalam melakukan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tidak ada yang sempurna didunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 16 Februari 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi	9
2.1.2 Pendapatan Daerah	12
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah	12
2.1.4 Teori Pajak	13

2.1.5 Pajak Daerah	22
2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto	24
2.1.7 Inflasi	29
2.1.8 Hubungan Antara Variabel Dependen Dengan Variabel Dependen	31
2.2 Penelitian Terdahulu	33
2.3 Kerangka Konseptual	34
2.4 Hipotesis	37
BAB 3. METODE ANALISIS	38
3.1 Rancangan Penelitian	38
3.1.1 Jenis Penelitian	38
3.1.2 Unit Analisi	38
3.1.3 Tempat dan Waktu Penelitian	38
3.1.4 Jenis dan Sumber Data	38
3.2 Metode Analisis	39
3.2.1 Analisis Regresi	39
3.2.2 Uji Statistik	40
3.2.3 Uji Asumsi Klasik	43
3.3 Definisi Operasional	45
BAB 4. PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember	46
4.1.1 Kondisi Geografis	46
4.1.2 Kondisi Demografis	49
4.1.3 Kondisi perekonomian	50
4.2 Deskripsi Variabel	52
4.2.1 Penerimaan Pajak Daerah	52
4.2.2 Jumlah Penduduk	54
4.2.3 Jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	55

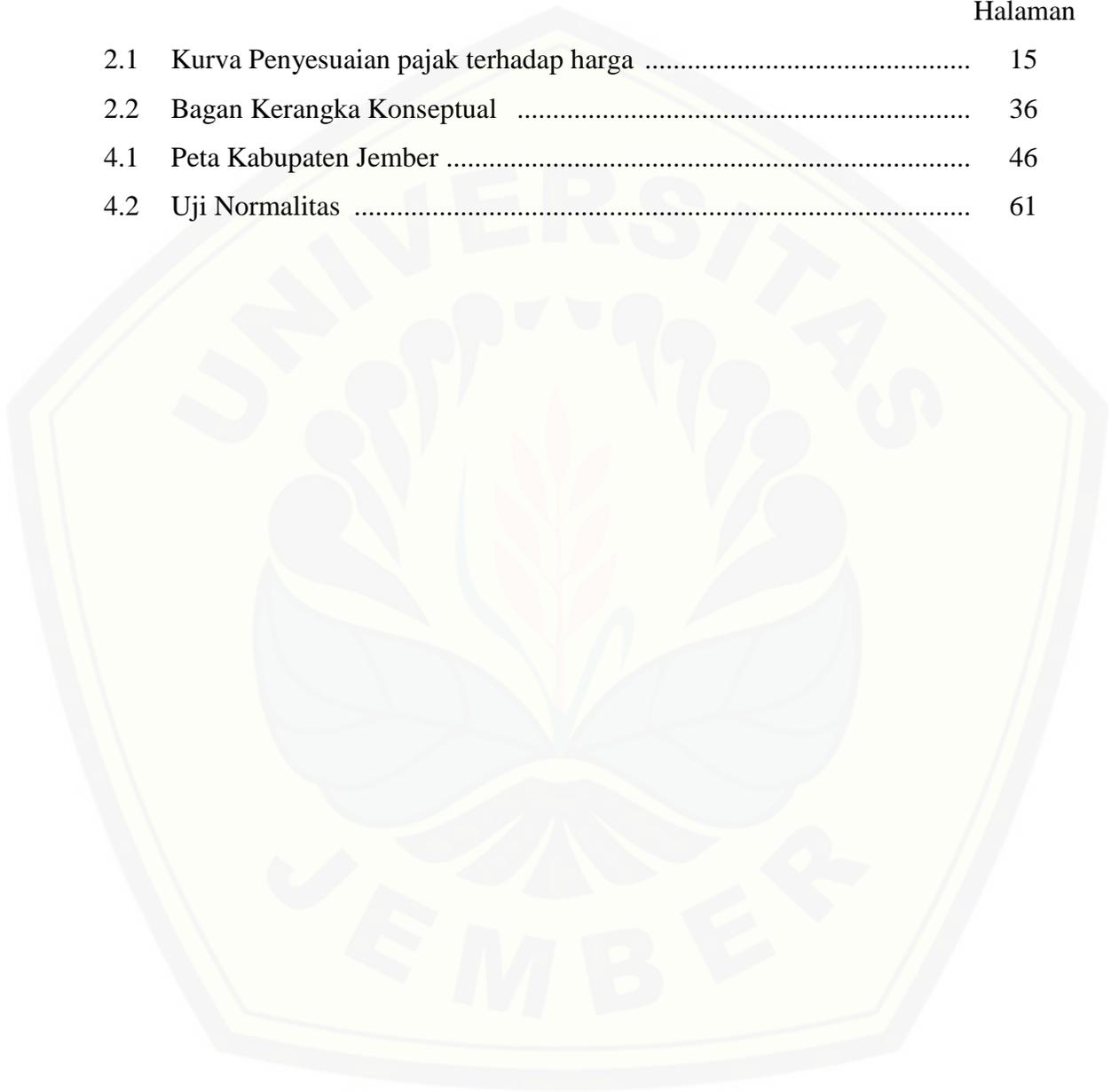
4.2.4 Inflasi	56
4.3 Analisis Data	57
4.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda	57
4.3.2 Uji Statistik	59
4.3.3 Uji Asumsi Klasik	61
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	63
4.4.1 Pembahasan Jumlah Angkatan Kerja Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	63
4.4.2 Pembahasan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	64
4.4.3 Pembahasan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	65
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Jember Tahun 2008-2013	4
1.2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Jember Tahun 2008-2013	5
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	33
4.1 Wilayah Administratif Kecamatan Kabupaten Jember	48
4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jember Menurut Jenis Kelamin	50
4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember Periode Tahun 2009-2013 (Dalam Persen)	51
4.4 Perkembangan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember	52
4.5 Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009-2013	54
4.6 Perkembangan Jumlah Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2000-2013	55
4.7 Perkembangan jumlah PDRB Kabupaten Jember ADHK 2000 (Juta Rupiah) Tahun 2000-2013	56
4.8 Laju Inflasi Kabupaten Jember Tahun 2000-2013	57
4.9 Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda	58
4.10 Hasil Auxiliary Regression	62
4.11 Hasil Uji Langrange-Multiplier	62
4.12 Uji White	63

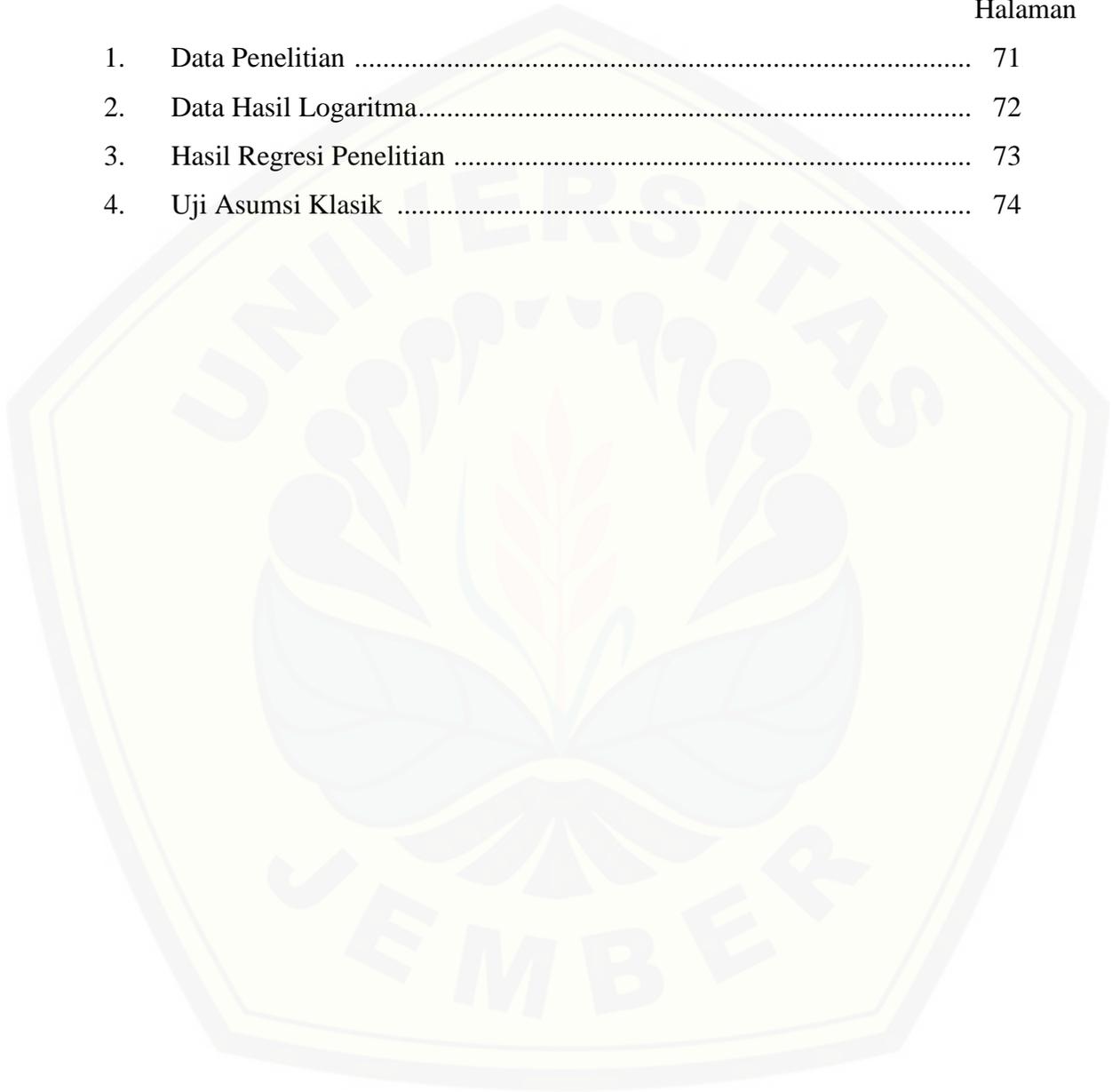
DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kurva Penyesuaian pajak terhadap harga	15
2.2 Bagan Kerangka Konseptual	36
4.1 Peta Kabupaten Jember	46
4.2 Uji Normalitas	61



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Data Penelitian	71
2. Data Hasil Logaritma.....	72
3. Hasil Regresi Penelitian	73
4. Uji Asumsi Klasik	74



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan, yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan nasional. Bagi negara Indonesia Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan memanfaatkan kekayaan alam setiap daerah secara optimal. Oleh karena itu, pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Ghofir, 2000).

Kegiatan ekonomi pada setiap daerah kabupaten atau kota yang bervariasi dalam setiap pengembangan potensi ekonominya diperlukan pembangunan daerah yang terpadu dan serasi, serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung pada setiap daerah benar-benar sesuai dengan proporsi dan potensi yang dimiliki. Untuk itu pemerintah memberlakukan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Alasan yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah adalah tidak meratanya pembangunan di daerah selama ini menyebabkan ketimpangan antara

pemerintah pusat dan daerah. Selain itu campur tangan pemerintah pusat di masa lalu yang mengakibatkan terhambatnya pengembangan yang dimiliki oleh daerah. Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru yang merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Diberlakukannya undang-undang tentang otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mengelola sumber penerimaan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Artinya daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah dan ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin untuk menciptakan kemandirian daerah. Semakin besar penerimaan dari daerah sendiri, maka akan sangat memungkinkan daerah dalam mempercepat pembangunan di daerah untuk mensejahterakan penduduknya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan daerah otonom terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan PAD dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan yang sepenuhnya dapat direncanakan dan direalisasi oleh pemerintah daerah, pendapatan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah dapat berbeda antara satu daerah dan daerah lain karena potensi yang berbeda. Selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bentuk peran serta masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Jaka Sriyana, 1999:4).

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sumber penerimaan pajak daerah yang diperoleh kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam undang-undang ini juga diatur sistem perpajakan dimana pemerintah daerah tidak dapat menambahkan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan potensi daerah. Dengan adanya sepuluh sektor pajak daerah pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sektor-sektor pajak tersebut dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya tingkat kesenjangan antar wilayah dan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. Teori Pertumbuhan ekonomi Neo Klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu: modal, tenaga kerja, dan teknologi. Produk Domestik Regional Bruto dapat meningkat apabila investasi di daerah tersebut meningkat, investasi akan meningkat jika ditunjang dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah, untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan investasi maka dibutuhkan dana untuk membiayai

pembangunan yang dipungut dari pajak dan non pajak. Dengan demikian keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah akan dapat meningkatkan PDRB (Sukirno, 1994:456).

Peningkatan PAD khususnya pajak daerah tentunya tidak lepas dari kondisi perekonomian daerah tersebut. Kondisi perekonomian ini tercermin dari besarnya atau peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tiap tahunnya. Besarnya PDRB suatu wilayah merupakan cerminan keberhasilan kinerja ekonomi yang secara tidak langsung akan mempengaruhi besarnya PAD melalui aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi pajak yang ada.

Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten yang terletak di sebelah timur Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember merupakan pusat pertumbuhan ekonomi eks Karesidenan Besuki. Sebagai Kabupaten yang menjadi pusat pertumbuhan di eks Karesidenan Besuki, tentu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan PDRB dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Jember Tahun 2008-2013

Tahun	PDRB	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2008	9.226.767,89	5,98
2009	10.891.607,20	18,04
2010	11.550.549,44	6,04
2011	12.359.522,18	7,00
2012	13.250.979,79	7,21
2013	14.165.901,65	6,90

Sumber: BPS Kabupaten Jember

Kabupaten Jember termasuk daerah yang sedang berkembang. Dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB selalu mengalami peningkatan. Dalam tabel 1.1 diketahui bahwa PDRB Kabupaten Jember pada setiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun dalam pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi naik sebesar 12,06% lalu mengalami penurunan pada tahun 2010 sebesar 12% karena disebabkan oleh krisis moneter global pada tahun 2007.

Menurut Kuncoro (dalam Susanto, 2014:1) pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses serta kegiatan dimana pemerintah daerah serta seluruh komponen masyarakat baik dari lembaga maupun individu untuk mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan guna menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Adanya aktivitas penduduk dalam perekonomian tentunya akan mempengaruhi pendapatan daerah. Salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember adalah pajak. Pajak memiliki kontribusi yang besar bagi PAD Kabupaten Jember, hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.2.

Tabel. 1.2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Jember Tahun 2008-2013

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Besarnya Kontribusi (%)
2008	136.524.604.367	24.222.730.280	17,74
2009	146.549.194.836	26.471.756.842	18,06
2010	153.780.905.393	30.841.171.434	20,06
2011	182.797.340.158	40.708.373.394	22,27
2012	256.375.203.950	55.628.583.942	21,70
2013	308.387.728.004	95.188.144.409	30,87

Sumber: BPS Kabupaten Jember

Besarnya penerimaan pajak di Kabupaten Jember tidak lepas dari laju pertumbuhan ekonomi dan besarnya PDRB yang mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan PDRB tidak lepas dari dampak meningkatnya aktivitas ekonomi yang kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jember. Meningkatnya kesejahteraan Kabupaten Jember sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak juga akan meningkat. Menurut Norfridwitya (dalam Susanto, 2014:13) menjelaskan bahwa besar kecilnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk bertambah maka pendapatan yang diterima juga akan meningkat karena adanya jumlah penduduk yang produktif dalam perekonomian. Sehingga apabila jumlah penduduk mengalami peningkatan hal tersebut dapat berdampak positif dalam jangka waktu tertentu juga akan memberikan dampak langsung terhadap penerimaan pajak daerah.

Meningkatnya pendapatan masyarakat juga harus diimbangi dengan penyediaan barang dan jasa yang disediakan oleh industri. Jika permintaan agregat tinggi tanpa diimbangi dengan penyediaan barang dan jasa maka akan menyebabkan inflasi. Jika terjadi inflasi maka akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam berkonsumsi dan kemampuan membayar pajak serta menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pemerintah harus dapat menjaga kestabilan perekonomian dan menjaga inflasi pada tingkat yang rendah agar penerimaan pajak daerah dapat maksimal serta laju pertumbuhan ekonomi dapat maksimal.

Dengan melihat kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah diharapkan pemerintah dapat mampu memanfaatkan potensi yang ada dan menetapkan strategi kebijakan yang efektif dan efisien agar penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember dapat terus meningkat dan maksimal. Hal tersebut yang melatar belakangi penelitian mengenai “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Jember yang potensial. Namun demikian, kontribusi pajak daerah terhadap Kabupaten Jember mengalami fluktuasi atau ketidak stabilan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember, diantaranya jumlah penduduk, PDRB, inflasi dan jumlah industri. Oleh sebab itu sangat menarik untuk dianalisis sejauh mana faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember?
2. Berapa besar pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember?
3. Berapa besar pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Menambah khasanah keilmuan serta sumber pustaka (referensi) dalam bidang makro khususnya tentang perpajakan.
2. Bagi Masyarakat
Sebagai acuan bagi masyarakat terutama wajib pajak untuk menyadari pentingnya membayar pajak.
3. Bagi Pemerintah
 - a) Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis untuk meningkatkan realisasi pajak daerah.
 - b) Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jember dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jember dalam menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Jember.
4. Bagi Akademi / Pendidikan
Sebagai bahan informasi, referensi dan perbandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi (barang dan jasa) suatu negara yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut Rostow teori pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian dibagi menjadi lima tahap yaitu:

1. Masyarakat tradisional (*the traditional society*)
2. Pra syarat untuk lepas landas (*the preconditions for take-off*)
3. Lepas landas (*the take-off*)
4. Gerakan ke arah kedewasaan (*the drive to maturity*)
5. Masa konsumsi tinggi (*high massconsumption*)

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut pandangan ekonom klasik terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi banyak faktor, pakar ekonomi kalsik pada umumnya hanya menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi.

1) Adam Smith

Teori Adam Smith sering dianggap sebagai awal dari pengkajian masalah pertumbuhan secara sistematis (Sukirno, 2002:433). Proses pertumbuhan ekonomi

Adam Smith dalam jangka panjang secara sistematis terdapat tiga aspek, yaitu (Arsyad, 1992:42):

a) Sumber Alam Yang Tersedia

Sumber alam yang tersedia (tanah sebagai faktor produksi) merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Sumber daya ini belum digunakan secara penuh, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan output.

b) Jumlah Penduduk

Menurut Smith yang sangat menentukan jumlah penduduk pada suatu masa tertentu adalah tingkat upah. Jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah *subsisten* (tingkat upah yang hanya cukup untuk hidup pas-pasan), maka jumlah penduduk akan meningkat. Smith juga menyatakan bahwa tingkat upah ditentukan oleh stok kapital dan tingkat pertumbuhan output. Oleh karena itu jumlah penduduk akan meningkat atau menurun tergantung pada stok modal dan pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu.

c) Stok Barang Modal

Stok modal menurut Smith merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Perannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output, sehingga jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok. Pengaruh stok modal terhadap tingkat output total bisa secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung maksudnya adalah karena penambahan modal akan langsung meningkatkan output. Sedangkan pengaruh tidak langsung maksudnya adalah peningkatan produktifitas perkapita yang dimungkinkan terjadinya spesialisasi dan pembagian kerja yang semakin tinggi.

Dalam sistem perekonomian sosialis peranan pemerintah sangat besar, tetapi sangat terbatas dalam sistem perekonomian kapitalis murni. Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi:

a) Memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.

- b) Menyelenggarakan peradilan.
- c) Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti: jalan raya, dam, dan sebagainya,

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik pemerintah membutuhkan anggaran. Mekanisme penyelenggaraan anggaran tersebut dilakukan melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencerminkan besaran, pertumbuhan, maupun struktur dari anggaran pemerintah yang dianut oleh suatu negara.

b. Teori Keynes

Teori Keynes adalah teori ekonomi yang didasarkan pada ide ekonom John Maynard Keynes pada abad 20. Teori ini menjelaskan tentang suatu ekonomi campuran, di mana baik negara maupun sektor swasta memegang peranan penting. Kebangkitan ekonomi Keynesianisme menandai berakhirnya ekonomi laissez-faire, yaitu dimana suatu teori ekonomi yang berdasarkan pada keyakinan bahwa pasar dan sektor swasta dapat berjalan sendiri tanpa campur tangan negara (pemerintah).

Pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara, maka semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya, demikian pula sebaliknya. Teori ini menyatakan bahwa trend ekonomi makro dapat memengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran dan deflasi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluarannya, maka uang yang beredar di masyarakat akan bertambah sehingga masyarakat akan terdorong untuk berbelanja dan meningkatkan permintaannya (sehingga permintaan agregat bertambah). Selain itu, tabungan juga akan meningkat sehingga dapat digunakan sebagai modal investasi, dan kondisi perekonomian akan kembali ke tingkat normal.

2.1.2 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan yang didapatkan oleh daerah yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana penerimaan yang diperoleh dari pemerintah pusat. Dana penerimaan dari pusat dalam realisasinya yaitu bisa dana bagi hasil penerimaan pajak atau lainnya yang berbentuk subsidi untuk keperluan pembangunan daerah dan sebagainya.

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Adapaun sumber pendapatan daerah diperoleh dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Dana Perimbangan.
- c. Lain-lain penerimaan yang sah.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang terdapat dalam wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi Daerah, meliputi retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perijinan tertentu.

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

2.1.4 Teori Pajak

a. Teori Pajak Musgrave

Pemerintah dalam menyelenggarakan fungsinya membutuhkan anggaran. Pendanaan anggaran tersebut dapat diperoleh dengan cara menjalankan kebijakan fiskal dan salah satunya yaitu dengan pemungutan pajak. Pemungutan pajak dibebankan kepada subjek (wajib pajak) dan objek (perusahaan). Dalam prakteknya pemungutan pajak harus dengan dasar hukum atau Undang-Undang yang berlaku. Dalam pemungutan pajak harus dipenuhi persyaratan struktur pajak yang baik, yaitu (Musgrave 1993:230):

- 1) Penerimaan atau pendapatan harus ditentukan dengan tepat.
- 2) Distribusi beban pajak harus adil. Setiap orang harus dikenakan pembayaran dengan kemampuannya.
- 3) Yang menjadi masalah penting adalah bukan hanya pada titik-titik mana pajak tersebut harus dibebankan, tetapi oleh siapa pajak tersebut pada akhirnya harus ditanggung.
- 4) Pajak harus dipilih sedemikian rupa untuk meminimumkan terhadap keputusan perekonomian, dalam hubungannya dengan pasar yang efisien.
- 5) Struktur pajak harus memudahkan penggunaan kebijakan fiskal, untuk mencapai stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi.

- 6) Sistem pajak harus menerapkan administrasi yang wajar dan tegas atau pasti serta harus dapat dipahami oleh wajib pajak.
- 7) Biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya, harus serendah mungkin jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan lain.

Dalam melakukan pemungutan pajak terapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya penerimaan pajak, yaitu:

- 1) Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan masyarakat yang menetap pada suatu daerah atau negara tertentu. Besar kecilnya jumlah penduduk suatu negara akan mempengaruhi penerimaan pajak. Musgrave menyatakan besar kecilnya jumlah penduduk pada suatu daerah atau negara tidak menjamin besaran dari penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi. Jika suatu daerah atau negara perekonomiannya baik maka masyarakat sejahtera dan mampu untuk membayar berbagai pungutan (salah satunya pajak). Namun jika perekonomian suatu daerah atau negara buruk maka akan terjadi pengangguran dan banyaknya masyarakat yang memiliki penghasilan kecil yang hanya cukup untuk untuk hidup sederhana yang tidak mungkin untuk dibebani berbagai pungutan.

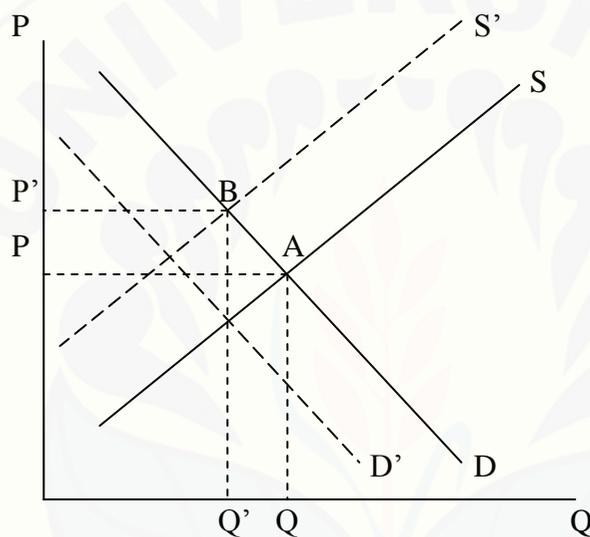
- 2) PDRB

PDRB merupakan sebuah tolak ukur gambaran perekonomian suatu negara atau daerah. Besarnya PDRB berarti pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan semakin tinggi. Bila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut juga akan meningkat. Dengan naiknya pendapatan masyarakat, maka tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat, dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Disamping itu semakin tinggi pendapatan seseorang,

maka akan semakin tinggi kemampuan seseorang untuk membayar pajak (ability to pay) berbagai pungutan.

3) Inflasi

Inflasi merupakan gejala ekonomi dimana harga barang-barang terus mengalami kenaikan. Naiknya harga barang-barang akan berpengaruh terhadap penerimaan pungutan pajak.



Gambar 2.1 Kurva Penyesuaian pajak terhadap harga

Berdasarkan gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa dengan adanya inflasi atau kenaikan harga-harga (termasuk harga bahan baku) menyebabkan perusahaan menaikkan harga suatu barang (produk) naik dari P ke P'. Ini menyebabkan kurva supply bergeser keatas menjadi S'. Hal ini juga berefek pada jumlah permintaan yang berkurang dari Q menjadi Q' dan menggeser kurva demand menjadi D'. Dengan menurunnya permintaan maka keuntungan perusahaan menjadi berkurang. Dengan berkurangnya laba atau keuntungan perusahaan maka akan berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar pajak. Sehingga penerimaan pajak menjadi berkurang.

b. Pengertian Pajak

Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Ghofir (2000:12) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2003:9) pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi pajak tersebut di atas, jelas bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan, pengabdian, serta peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional dan kewajiban perpajakan setiap warga negara telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah.

Pajak dapat dipandang dari berbagai aspek dan sudut pandang. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak juga sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Dari sudut pandang hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara tersebut. Dari sudut pandang keuangan, pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dari sudut pandang sosiologi ini pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang

menyangkut akibat/ dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada masyarakat sendiri (Waluyo dan Wirawan, 2007:4).

c. Asas Pemungutan Pajak

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli ekonomi mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, yaitu:

- 1) Menurut Adam Smith dalam bukunya "*Wealth of Nations*" dengan teori "*The Four Maxims*", asas dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
 - a) Asas *Equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus adil sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak.
 - b) Asas *Certainty* (asas kepastian hukum) adalah seluruh pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan UU yang berlaku.
 - c) Asas *Convenience of Payment* (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan) adalah pajak harus dipungut pada saat wajib pajak dalam keadaan bahagia, misalnya pada saat wajib pajak baru menerima penghasilan atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
 - d) Asas *Efficiency* (asas efisien atau asas ekonomis) adalah biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, sehingga biaya pemungutan pajak lebih kecil dari hasil pemungutan pajak.
- 2) Menurut W.J Langenasas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
 - a) Asas daya pikul adalah besar kecilnya pajak yang dipungut harus disesuaikan dengan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan wajib pajak maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
 - b) Asas manfaat adalah pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan pembangunan dan untuk kepentingan umum.

- c) Asas kesejahteraan adalah pajak yang dipungut oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 - d) Asas kesamaan adalah dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus diperlakukan sama dalam jumlah tarif pajak.
 - e) Asas beban yang sekecil-kecilnya adalah pemungutan pajak diusahakan serendah mungkin, apabila dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak.
- 3) Menurut Adolf Wagner asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:
- a) Asas politik finansial adalah pajak yang dipungut negara jumlahnya harus memadai sehingga dapat membiayai pembangunan dan mendorong seluruh kegiatan negara.
 - b) Asas ekonomi adalah dalam penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya pajak pendapatan dan pajak barang-barang mewah.
 - c) Asas keadilan adalah pungutan pajak berlaku secara umum tanpa terkecuali, dalam pemungutannya harus adil.
 - d) Asas administrasi adalah mengatur segala urusan dalam perpajakan, seperti menyangkut masalah kapan dan dimana harus membayar, cara membayar pajak, dan besarnya biaya pajak
 - e) Asas yuridis adalah segala pungutan pajak harus berdasarkan pada Undang-Undang.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2001:2) terdapat beberapa syarat dalam pemungutan pajak yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak supaya tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan:

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu pencapaian keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Pengenaan pajak secara merata dan disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
Di negara Republik Indonesia, pajak diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

e. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) fungsi pajak ada dua, yaitu:

- 1) Fungsi Anggaran (budgetair)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah baik pusat atau daerah.
- 2) Fungsi mengatur (regulerend)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

f. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) dalam hukum pajak terdapat berbagai perbedaan jenis-jenis pajak yang terbagi dalam golongan-golongan besar. Perbedaan dan pengelompokan ini mempunyai fungsi yang berbeda. Berikut adalah penggolongan pajak:

- 1) Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya Dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a) Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dikenakan secara periodik atau berkala dengan menggunakan kohir. Kohir adalah surat ketetapan pajak dimana wajib pajak tercatat sebagai pembayar pajak dengan jumlah pajaknya yang terhutang, yang merupakan dasar dari penagihan. Misalnya: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang oleh si penanggung dapat dilimpahkan kepada orang lain, atau menurut pengertian administratif pajak yang dapat dipungut tidak dengan kohir dan pengenaannya tidak secara langsung periodik tergantung ada tidaknya peristiwa atau hal yang menyebabkan dikenakannya pajak, misalnya: Pajak Penjualan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.
- 2) Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya Dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a) Pajak Subjektif adalah wajib pajak yang memperhatikan pribadi wajib pajak, pemungutannya berpengaruh pada subjeknya, keadaan pribadi wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Misalnya: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak Objektif adalah pajak yang tidak memperhatikan wajib pajak, tidak memandang siapa pemilik atau keadaan wajib pajak, yang dikenakan atas objeknya. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

- 3) Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya Dibedakan menjadi dua yaitu:
- a) Pajak Pusat atau Negara adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang penyelenggaraannya di daerah dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya, yang termasuk dalam pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat adalah:
 - 1) Pajak yang dikelola oleh inspektorat jenderal pajak, misalnya: Pajak Penghasilan, pajak kekayaan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah, bea materai, IPEDA, bea lelang.
 - 2) Pajak yang dikelola direktorat moneter, misalnya : pajak minyak bumi.
 - 3) Pajak yang dikelola direktorat jenderal bea cukai, misalnya : bea masuk, ajak ekspor.
 - b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Daerah berdasarkan peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga di daerahnya, misalnya : pajak radio, pajak tontonan.

g. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2007:15) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu :

- 1) *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak yang ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

- 2) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya adalah:
 - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - b) Wajib pajak bersifat pasif.
 - c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- 3) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:
 - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - 2) Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
 - 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2.1.5 Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:13) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

b. Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan jenis-jenis pajak daerah terdiri dari:

- 1) Pajak daerah tingkat I terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);

- c) Pajak Bahan Kendaraan Bermotor (PBBKB), dibagi hasilkan dengan presentase 10% untuk daerah tingkat I dan 90% untuk daerah tingkat II.
- 2) Pajak daerah tingkat II terdiri dari:
- a) Pajak Hotel dan Restoran;
 - b) Pajak Hiburan;
 - c) Pajak Reklame;
 - d) Pajak Penerangan Jalan;
 - e) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
 - f) Pajak Pemanfaatan Penggunaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Keluarnya peraturan Pemerintah mengenai Desentralisasi Fiskal pada tahun 2000, maka dikeluarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan jenis-jenis pajak daerah terdiri dari:

- 1) Jenis Pajak Propinsi terdiri dari:
- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d) Pajak Pemanfaatan Penggunaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/ Kota terdiri dari:
- a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
 - g) Pajak Parkir.

Pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan dan memberlakukan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang bertujuan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna tercapainya kemandirian daerah. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 maka pendapatan daerah terdiri dari:

- 1) Pajak Propinsi terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan; dan
 - e) Pajak Rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g) Pajak Parkir;
 - h) Pajak Air Tanah;
 - i) Pajak Sarang Burung Walet;
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut (Sukirno,2004) PDRB adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa

membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengertian PDRB adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun. PDRB menggambarkan struktur perekonomian suatu daerah pada tahun yang bersangkutan.

b. Pendekatan Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut BPS cara penghitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu:

- 1) Menurut pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi didalam suatu region dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit tersebut diatas dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha yaitu :
 - a) Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan.
 - b) Pertambangan dan Penggalian,
 - c) Industri Pengolahan,
 - d) Listrik, Gas dan Air Bersih,
 - e) Bangunan,
 - f) Perdagangan, Hotel dan Restoran,
 - g) Pengangkutan dan Komunikasi,
 - h) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan,
 - i) Jasa-jasa.
- 2) Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, yaitu :
 - a) Pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung,

- b) konsumsi pemerintah,
- c) pembentukan modal tetap domestik bruto,
- d) perubahan stock, dan
- e) ekspor netto disuatu region dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
Ekspor netto merupakan ekspor dikurangi impor. Ekspor dalam hal ini tidak terbatas hanya keluar negeri, tetapi termasuk juga yang hanya keluar Daerah / Wilayah baik lewat laut, udara maupun lewat darat. Demikian juga kebalikannya yaitu Impor.

3) Menurut pendekatan pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu region dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, kecuali faktor pendapatan diatas, termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Jumlah semua komponen pendapatan per sektor ini disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. PDRB merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh sektor (lapangan usaha).

c. Sektor-sektor dalam PDRB

Sektor-sektor yang ada dalam PDRB adalah sebagai berikut:

1) Sektor Pertanian, Perternakan, Kehutanan dan Perikanan

a) Tanaman Bahan Makanan

Sub sektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan yaitu padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedelai, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, kentang, kacang hijau, tanaman pangan lainnya dan hasil-hasil produksi ikutannya. Termasuk dalam cakupan ini adalah hasil-hasil dari pengolahan yang dilakukan secara sederhana seperti beras tumbuk, dan gaplek yang dilakukan oleh petani.

b) Tanaman Perkebunan

Komoditi yang dicakup adalah hasil tanaman perkebunan yang diusahakan seperti kelapa/kopra, jambu mente, teh, kopi, karet, coklat, kapok randu, kapok, tebu, tembakau, cengkeh, lada, jarak, kapas, tanaman obat-obatan dan tanaman perkebunan lainnya, termasuk produk ikutannya.

c) Peternakan dan hasil-hasilnya

Sub sektor ini mencakup produksi ternak besar, ternak kecil, unggas maupun hasil-hasil ternak seperti susu segar, telur serta hasil pemotongan ternak. Produksi ternak diperkirakan sama dengan jumlah ternak yang dipotong ditambah perubahan stok populasi ternak dan ekspor ternak netto.

d) Kehutanan

Sub sektor kehutanan mencakup kegiatan yang dilakukan di areal hutan oleh perorangan dan badan usaha, yang mencakup usaha penanaman, pemeliharaan, dan penebangan kayu, pengambilan hasil hutan lainnya. Kegiatan ini meliputi penebangan kayu yang menghasilkan kayu gelondongan, kayu baker, arang dan bambu; sedangkan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jember Tahun 2013 16 hasil kegiatan pengambilan hasil hutan lainnya berupa rotan, damar, kulit kayu, kopal, nipah, rubung, akar-akaran dan sebagainya masih termasuk dalam sektor ini.

e) Perikanan

Yang dicakup dalam kegiatan perikanan adalah seluruh kegiatan penangkapan dan pengambilan serta budi daya perikanan laut, perairan umum, tambak, kolam, sawah (mina padi) dan keramba.

2) Sektor Pertambangan dan Penggalian.

Sektor ini mencakup kegiatan pertambangan, penggalian, pengeboran, penyaringan, dan pengambilan pemanfaatan segala macam benda non biologis, seperti barang tambang, mineral dan barang galian, serta pembuatan garam kasar.

- 3) Industri Pengolahan,
Sektor ini mencakup kegiatan untuk mengubah atau mengolah suatu barang organik dan anorganik menjadi barang baru yang mempunyai nilai lebih tinggi, sedang pengolahannya dapat dilakukan dengan tangan atau mesin.
- 4) Listrik, Gas dan Air Bersih,
 - a) Listrik
Sub sektor ini mencakup semua kegiatan kelistrikan, baik yang diusahakan oleh PLN Distribusi, PLN pembangkit wilayah Jawa Timur dan PLN Pengatur Beban.
 - b) Air Bersih
Sub sektor ini mencakup air minum yang diusahakan oleh Perusahaan Air Minum.
- 5) Bangunan,
Sektor bangunan mencakup seluruh kegiatan pembangunan fisik konstruksi, baik berupa gedung, jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, dam, irigasi, eksplorasi minyak bumi maupun jaringan listrik, gas, air minum, telepon, dan sebagainya.
- 6) Perdagangan,
Sektor perdagangan mencakup seluruh kegiatan jual beli atas barang atau jasa termasuk perhotelan dan restoran.
- 7) Pengangkutan dan Komunikasi,
Sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan umum untuk barang dan penumpang, baik melalui darat, laut, sungai/ danau, dan udara. Sektor ini mencakup pula jasa penunjang angkutan dan komunikasi.
- 8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan,
Sektor ini meliputi kegiatan perbankan, lembaga keuangan bukan bank, jasa penunjang keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan.
- 9) Jasa-jasa.

Mencakup kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan, jasa pemerintahan lainnya, jasa sosial dan kemasyarakatan, jasa hiburan dan kebudayaan serta jasa perorangan dan rumah tangga.

2.1.7 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara keseluruhan yang diakibatkan oleh naiknya harga-harga secara serempak dan terus-menerus. Inflasi dapat diukur dengan melihat sejumlah besar barang dan jasa dan menghitung kenaikan harga rata-rata selama beberapa periode waktu. Inflasi berkepanjangan adalah kenaikan harga secara keseluruhan yang berlangsung terus selama satu periode yang lama (Case dan Fair, 2004).

Menurut BPS inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara.

a. Macam-Macam Penyebab Inflasi

Kenaikan harga yang terjadi pada negara-negara umumnya kerana disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Sukirno (2006) inflasi dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Inflasi berdasarkan sumber atau penyebab terjadinya kenaikan harga, inflasi biasanya dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Inflasi tarikan permintaan

Inflasi tarikan permintaan adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh penambahan pengeluaran yang besar dan tidak dapat dipenuhi oleh kemampuan produksi yang tersedia.

b) Inflasi desakan biaya

Inflasi tarikan biaya adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi sebagai akibat dari kenaikan bahan produksi atau kenaikan upah.

c) Inflasi diimpor

Inflasi diimpor adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang impor yang digunakan sebagai bahan mentah produksi dalam negeri.

2) Inflasi berdasarkan kepada tingkat kelajuan harga-harga yang berlaku. Inflasi biasanya dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a) Inflasi Merayap adalah inflasi yang terjadi pada tingkat 2-4 persen per tahun.
- b) Inflasi Sederhana adalah inflasi yang terjadi pada tingkat 5-9 persen per tahun.
- c) Hiperinflasi adalah inflasi yang terjadi pada tingkat $> 10\%$ - $> 100\%$ per tahun.

Disamping itu inflasi terjadi sebagai akibat dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, dan kekacauan politik dan ekonomi. Apabila terjadi inflasi maka prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan menjadi semakin memburuk apabila inflasi tidak dapat dikendalikan. Inflasi cenderung akan menjadi bertambah cepat apabila tidak diatasi. Inflasi yang bertambah serius tersebut cenderung untuk mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor. Kecenderungan ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2006).

b. Menghitung Laju Inflasi

1) GNP Deflator

GNP Deflator adalah rasio GNP (*Gross National Product*) nominal pada tahun tertentu terhadap GNP riil pada tahun tersebut. Hal ini merupakan ukuran inflasi

dari periode dimana harga dasar untuk perhitungan GNP riil digunakan sampai dengan GNP sekarang. Perhitungan cara ini melibatkan semua barang yang diproduksi.

2) Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index* (CPI)

Indeks harga konsumen berfungsi mengukur biaya pembelian kelompok barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen. Biasanya kelompok barang yang digunakan masyarakat dapat berubah. Hal ini disesuaikan pola konsumsi yang ada.

3) Indeks Harga Produsen (IHP)

IHP ini mengukur harga barang yang dibeli oleh produsen, yang meliputi bahan mentah dan barang setengah jadi. IHP juga digunakan untuk mengukur indeks harga pada awal distribusi. Kenaikan IHP dapat dijadikan tanda kenaikan IHK.

4) Indeks Biaya Hidup atau *Cost-of-living index* (COLI)

5) Indeks Harga Komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas tertentu.

6) Indeks Harga Barang-barang Modal.

2.1.8 Hubungan Antara Variabel Dependen Dengan Variabel Independen

a. Jumlah Penduduk

Menurut BPS penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Aktifitas ekonomi yang dilakukan penduduk akan mempengaruhi perekonomian suatu negara atau daerah, karena penduduk merupakan subjek atau penggerak perekonomian. Dengan meningkatnya jumlah penduduk maka perekonomian pada daerah tersebut juga akan meningkat. Sehingga tumbuhnya perekonomian pada suatu daerah akan berpengaruh terhadap pendapatan daerah yang berupa pajak, retribusi, dan lain sebagainya.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut (Sukirno, 2004) PDRB adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Semakin besar PDRB atau semakin maju perekonomian suatu daerah maka semakin besar juga pendapatan masyarakatnya. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akan menambah kekayaan dan jumlah besarnya konsumsi masyarakat maka semakin tinggi kemampuan masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak.

c. Inflasi

Dengan adanya inflasi tidak hanya berpengaruh pada kenaikan harga tetapi juga akan berimbas pada kondisi ekonomi lainnya. Perkembangan inflasi akan mempengaruhi laju perekonomian suatu negara. Setiap negara akan berusaha agar keuangannya stabil sehingga kegiatan perekonomian masyarakat dapat berkembang. Dengan terjadinya inflasi akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam berkonsumsi maka akan menurunkan kemampuan masyarakat (wajib pajak) dalam membayar pajak. Dalam penelitian yang dilakukan Tamara (2009) menyimpulkan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap realisasi perolehan pajak daerah di Kota Bandung.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian sejenis sebelumnya yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini dengan beberapa kategori:

Tabel. 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Alat Analisis	Variabel	Hasil
1.	Hadi Sasana (2005), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas)	Regresi Linier Berganda	PDRB, Jumlah Wajib Pajak, Tingkat Inflasi, Luas Lahan, Jumlah Bangunan, Krisis Moneter	<ul style="list-style-type: none"> - Secara simultan variabel PDRB, wajib pajak, tingkat inflasi, luas lahan, jumlah bangunan, dan krisis moneter berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kabupaten banyumas - Variabel jumlah bangunan mempunyai pengaruh paling besar dengan nilai koefisien regresi sebesar 3,599 - Variabel krisis moneter berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan
2.	Iwan Susanto (2014), Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kota Malang)	Regresi Linier Berganda	Jumlah Penduduk, PDRB, Tingkat Inflasi	<ul style="list-style-type: none"> - Secara bersama-sama variabel PDRB, jumlah penduduk, dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap PAD kota malang - Variabel pdrb dan jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan - Variabel tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD kota malang
3.	Setia Neo Liberty (2013), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak	Regresi Linier Berganda dengan metode OLS	Jumlah Penduduk, PDRB, Jumlah Industri	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel jumlah industri dan PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak reklame

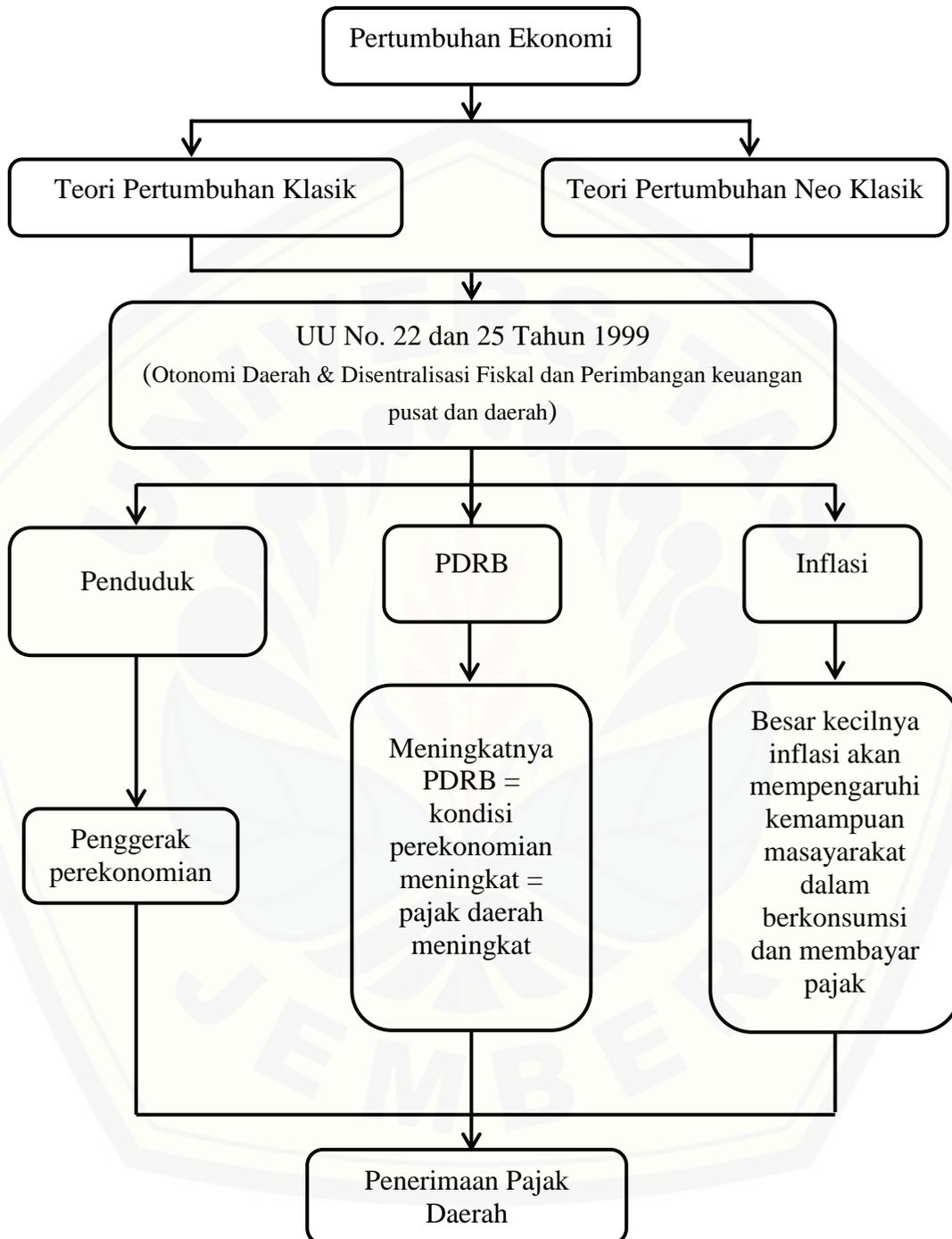
Lanjutan Tabel 2.1

	Reklame di Kabupaten Jember			di kabupaten jember. - Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan.
4.	Nadya Fazriana Haniz (2013), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal	Regresi Linier Berganda dengan metode OLS	Jumlah Wajib Pajak, Pendapatan Perkapita, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi	- Variabel wajib pajak, pendapatan perkapita, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Tegal. - Variabel Inflasi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Tegal.
5.	Kristiana Advina Helti (2010), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah Serta Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Dalam Pemungutan (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar)	Regresi Linier Berganda, Analisis Ratio	Inflasi, Jumlah Penduduk, PDRB	- Pemungutan pajak pada tahun 2002-2008 sangat efisien dan efektif. - variabel inflasi dan PDRB berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. - Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Karanganyar.

2.3 Kerangka Konseptual

Pada dasarnya pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Besarnya penerimaan pajak suatu daerah tergantung dari potensi-potensi pajak yang ada pada setiap daerah. Pajak sendiri merupakan sumber terbesar Pendapatan Asli daerah. Semakin besar PAD suatu daerah maka daerah tersebut semakin mandiri dalam membiayai kegiatannya pemerintahannya.

Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa PDRB, jumlah penduduk, dan tingkat inflasi mempengaruhi penerimaan pajak daerah. PDRB merupakan nilai total produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam daerah tertentu biasanya selama satu tahun. Dengan meningkatnya PDRB suatu daerah dapat dikatakan daerah tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi. Dengan tumbuhnya perekonomian daerah tersebut akan menarik investor untuk berinvestasi dan membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan penduduknya, sehingga akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Namun dengan meningkatnya pendapatan masyarakat harus diimbangi dengan peyediaan barang dan jasa. Jika permintaan agregat tinggi tanpa diimbangi dengan penyediaan barang dan jasa yang memadai maka akan menyebabkan inflasi. Jika terjadi inflasi maka akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam berkonsumsi dan kemampuan membayar pajak serta menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pemerintah harus dapat menjaga kestabilan perekonomian dan menjaga inflasi pada tingkat yang rendah agar penerimaan pajak daerah dapat maksimal. Berdasarkan landasan teori dan uraian diatas dapat digambarkan dalam bagan konseptual dibawah ini:



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian sebelumnya maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

- H₁: Diduga variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember.
- H₂: Diduga variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember.
- H₃: Diduga variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode yang menggambarkan permasalahan dan dianalisis menggunakan metode angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran, dan menampilkan hasilnya.

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas jumlah penduduk, PDRB, dan Inflasi yang bertujuan untuk mengetahui variabel manakah yang memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember.

3.1.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember dengan pertimbangan Kabupaten Jember adalah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di eks Karesidenan Besuki. Lingkup penelitian ini adalah untuk mengamati pengaruh jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember pada tahun 1984-2013.

3.1.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi terkait yang telah disusun dan dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series* periode 1984-2013.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember dan BPS Jawa timur, serta Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Jember. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Tingkat penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember tahun 1984-2013.
- b. Jumlah penduduk Kabupaten Jember tahun 1984-2013.
- c. Tingkat PDRB atas harga konstan Kabupaten Jember tahun 1984-2013.
- d. Tingkat inflasi Kabupaten Jember tahun 1984-2013.

3.2 Metode Analisis

3.2.1 Analisis Regresi

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) maka penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS). Metode ini diyakini mempunyai sifat-sifat yang ideal dan dapat diunggulkan, yaitu secara teknis sangat kuat, mudah dalam perhitungan dan penarikan interpretasinya (Gujarati, 1999:23). Digunakannya metode ini untuk mengestimasi besarnya pengaruh dari Jumlah Penduduk (X_1), PDRB atas harga konstan 2000 (X_2), dan Inflasi (X_3), terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y), dapat dinotasikan secara fungsional sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3) \dots\dots\dots (3.1)$$

Dari model diatas kemudian ditransformasikan kedalam model ekonometrika, Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$\text{LnPPD} = \beta_0 + \beta_1(\text{LnPDDK}) + \beta_2(\text{LnPDRB}) + \beta_3(\text{Inf}) + e \dots\dots (3.2)$$

Dimana:

PPD : Penerimaan Pajak Daerah

β_0	: Konstanta
$\beta_1\beta_2\beta_3$: Koefisien regresi parsial
PDDK	: Jumlah penduduk
PDRB	: PDRB atas harga konstan 2000
Inf	: Inflasi
e	: Error term
Ln	: Logaritma Natural

3.2.2 Uji Statistik

Uji statistik dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pengaruh variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*). Uji statistik terdiri dari pengujian koefisien regresi parsial (uji F), uji koefisien regresi simultan (uji t), dan pengujian koefisien determinasi (R^2).

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, seluruh variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.
- 2) $H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

Nilai F hitung diperoleh dengan formula sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/(k - 1)}{1 - R^2/(N - 1)}$$

Keterangan:

k = jumlah parameter yang diestimasi termasuk konstanta

N = jumlah observasi

R^2 = koefisien determinasi

Kriteria pengujian dengan menggunakan tingkat kebenaran (α) 5% sebagai berikut:

- 1) Jika F hitung $>$ F tabel atau nilai probabilitas F hitung $<$ nilai probabilitas α , maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Jika F hitung $<$ F tabel atau nilai probabilitas F hitung $>$ nilai probabilitas α , maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya secara bersama-sama variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen.

b. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

- 1) $H_0 : \beta_1 \leq 0$, yaitu tidak ada pengaruh antara variabel jumlah penduduk secara individu terhadap variabel penerimaan pajak daerah.
 $H_1 : \beta_1 > 0$, yaitu terdapat pengaruh positif variabel jumlah penduduk secara individu terhadap variabel penerimaan pajak daerah.
- 2) $H_0 : \beta_2 \leq 0$, yaitu tidak ada pengaruh variabel PDRB secara individu terhadap variabel penerimaan pajak daerah.
 $H_1 : \beta_2 > 0$, yaitu terdapat pengaruh positif variabel PDRB secara individu terhadap variabel penerimaan pajak daerah.
- 3) $H_0 : \beta_3 \leq 0$, yaitu tidak ada pengaruh variabel inflasi secara individu terhadap variabel penerimaan pajak daerah.
 $H_1 : \beta_3 > 0$, yaitu terdapat pengaruh positif variabel inflasi secara individu terhadap variabel penerimaan pajak daerah.

Nilai t hitung dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$t = \frac{\beta_i - \beta_i^*}{SE(\beta_i)}$$

Keterangan:

β_i = parameter yang diestimasi

β_i^* = nilai hipotesis dari β_i ($H_0 : \beta_i^*$)

$SE(\beta_i)$ = simpangan baku β_i

Kriteria pengujian dengan menggunakan tingkat kebenaran (α) 5% sebagai berikut:

- 1) Apabila t hitung $>$ t tabel atau nilai t hitung $<$ nilai probabilitas maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Apabila t hitung $<$ t tabel atau nilai t hitung $>$ nilai probabilitas maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinan (R^2) untuk mengukur seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien R^2 adalah antara 0 – 1. Nilai R^2 yang sempurna adalah 1, dimana keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model. Dimana $0 < R^2 < 1$ sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah:

- 1) Nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.
- 2) Nilai R^2 yang besar atau mendekati satu, variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

3.2.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik disebut juga uji diagnosis. Uji asumsi klasik perlu dilakukan karena dalam model regresi perlu memperhatikan adanya penyimpangan-penyimpangan atas asumsi klasik, karena pada hakekatnya jika asumsi klasik tidak dipenuhi maka variabel-variabel yang menjelaskan akan tidak efisien.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk melihat apakah nilai residual dari model yang dibentuk terdistribusi normal atau tidak. Konsep pengujian uji normalitas menggunakan pendekatan *Jarque Berra Test*. Pedoman dari J-B test adalah:

- 1) Jika nilai J-B hitung $>$ nilai X^2 tabel atau probabilitas J-B hitung $<$ nilai probabilitas ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual *error term* adalah berdistribusi normal ditolak.
- 2) Jika nilai J-B hitung $<$ nilai X^2 tabel atau probabilitas J-B hitung $>$ nilai probabilitas ($\alpha = 5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual error term adalah terdistribusi normal (Wardhono, 2004).

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah adanya hubungan linear yang hampir sempurna diantara beberapa atau seluruh variabel independen dari model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali dalam Liberty, 2013). Tanda munculnya Multikolinieritas adalah nilai R^2 yang tinggi dan tidak satupun koefisien regresi yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara skostatik. Multikolinieritas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan auxiliary regressions untuk mendeteksi adanya multikolinieritas. Kriterianya adalah jika R^2

regresi persamaan utama lebih besar dari R^2 auxiliary regressions maka di dalam model tidak terdapat multikolinearitas.

c. Uji Autokolerasi

Uji Autokolerasi digunakan untuk melihat apakah ada korelasi antara periode t dengan periode $t-1$. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya autokorelasi adalah kesalahan dalam menentukan model, penggunaan lag pada model, dan memasukkan variabel yang saling terkait. Akibat adanya autokorelasi adalah parameter yang diestimasi menjadi bias dan varian minimum, sehingga tidak efisien (Wardhono, 2004). Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari masalah autokorelasi. Salah satu cara untuk menguji apakah dalam model mengandung autokorelasi yaitu dengan melakukan uji *Breuch-Godfrey* atau dengan nama lain uji *Langrange-Multiplier*. Metode ini didasarkan pada nilai F dan $Obs \cdot R\text{-Squared}$, dimana jika nilai probabilitas dari $Obs \cdot R\text{-Squared}$ melebihi tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$ maka dalam model yang digunakan tidak mengandung masalah autokorelasi.

d. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan apabila varians dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap atau disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Heteroskedastisitas lebih sering terjadi pada data *cross section* daripada data *time series*. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Park, Uji White, Uji Glejtser, dan Uji Breusch-Pagan-Godfrey. Cara untuk mendeteksi heterokedastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi dengan nilai residualnya. Model yang baik yaitu jika ada pola tertentu, seperti mengumpul ditengah, menyempit kemudian melebar.

3.3 Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pemahaman yang tidak sesuai dengan masalah yang dibahas maka definisi variabel operasional dan pengukurannya adalah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Ukuran yang digunakan adalah juta rupiah.
- b. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kabupaten Jember selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Ukuran yang digunakan adalah jiwa.
- c. Produk domestik bruto adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah kabupaten Jember dalam kurun waktu 1 tahun. Ukuran yang digunakan adalah juta rupiah.
- d. Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang secara umum dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama (terus-menerus) di Kabupaten Jember. Ukuran yang digunakan adalah persen (%).

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisi yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember.
2. PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten jember.
3. Tingkat inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten Jember.

5.2 Saran

Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan pemerintah daerah Kabupaten Jember yang meliputi akurasi data subjek dan objek pajak. Subjek dan objek pajak yang seharusnya dan belum terdaftar sebagai wajib pajak bisa terdaftar sebagai wajib pajak dengan cara melakukan sosialisasi dan pendataan ulang. Sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.
2. Meningkatkan sektor-sektor PDRB baik yang berhubungan langsung dan yang tidak berhubungan langsung dengan penerimaan pajak. Sehingga dapat menarik investor untuk membangun usaha di Kabupaten Jember. Dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.
3. Untuk meningkatkan penerimaan pajak disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk dapat menekan laju inflasi yang terjadi. Dengan menekan serendah-rendahnya tingkat inflasi diharapkan penerimaan pajak daerah dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Ghofir. 2000. *Optimalisasi Pajak Dalam Penerapan Otonomi Daerah*. Jakarta: Berita Pajak No. 15 Januari 2000.
- Ajija, S. R., Wulansari, D., Setianto, R. H., dan Primanthi, M.R. 2011. *Cara Cerdas Menguasai EViews*. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik. *Jawa Timur Dalam Angka berbagai edisi*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Jember Dalam Angka berbagai edisi*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- Case, Karl E dan Ray C Fair. 2004. *Prinsip-Prinsip Ekonomi, Jilid 2 Edisi Kedelapan*. Jakarta: ERLANGGA
- Dumairy(1996). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter. 2015. *Dasar-dasar Ekonometrika, Buku 1 Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika, Buku 2 Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haniz, Nandya Fazriana. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Helti, Kristina Advina. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Serta Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Dalam Pemungutan (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Jaka Sriyana. 1999. *Hubungan keuangan Pusat-Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 4 No. 1 hal 312-323.

- Jhingan, ML. 2002. *Ekonomi Pembanguna dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori Masalah Kebijakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Liberty, Setia Neo. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Jember*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Jember: Universitas Jember.
- Lincoln, Arsyad. 1999. *Ekonomi Pembangunan Edisi keempat*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Mankiew, N. Gregogry. 2006. *Makroekonomi, Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI
- Musgrave, R. A. & Musgrave, P B. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, edisi V*. Alih Bahasa Alfonsus Sirait. 1993. Erlangga. Jakarta.
- Nurrohman, Alfian. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Surakarta (Tahun 1994-2007)*. Fakultas Ekonomi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Sasana, Hadi. 2005. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan*. *Dinamika Pembangunan* Vol. 2 No. 1 Juli 2005 hal 19-29.
- Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Makro Ekonomi, Edisi Kedua*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2002. *Teori Makro Ekonomi, Edisi Kedua*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sutrisno P.H, 2002, *Dasar-Dasar Kebijakan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*, BPFE, Yogyakarta.

Thomas Sumarsan. 2010. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Waluyo dan Ilyas Wirawan B. 2007. *Perpajakan Indonesia, Edisi Ketujuh*. Jakarta: Salemba Empat.

Wardhono, A. 2004. *Mengenal Ekonometrika Teori dan Aplikasi. Edisi Pertama*. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Lampiran 1

Data Penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember.

Tahun	PPD (juta rupiah)	PDDK (jiwa)	PDRB ADHK 2000 (juta rupiah)	INF (%)
1984	255.808,40	1.880.516	107.655,28	5,95
1985	300.503,54	1.871.563	117.527,27	2,79
1986	414.795,10	1.908.247	131.442,89	7,85
1987	475.599,00	1.910.931	141.154,09	11,98
1988	531.601,32	1.912.965	154.331,53	7,57
1989	671.332,07	1.912.554	167.861,65	5,19
1990	769.321,00	1.913.817	186.050,38	5,23
1991	792.731,00	2.054.301	457.427,93	6,78
1992	970.835,00	2.040.642	422.385,87	5,12
1993	1.358.851,00	2.040.543	431.442,41	6,25
1994	2.288.000,00	2.040.893	563.275,46	5,45
1995	2.858.947,00	2.047.495	732.997,72	5,04
1996	2.858.694,40	2.067.660	976.540,14	6,17
1997	3.600.844,00	2.078.473	1.253.674,17	8,38
1998	3.699.583,00	2.083.068	2.827.207,53	84,95
1999	3.723.022,00	2.106.632	3.120.769,36	3,16
2000	5.408.901,87	2.105.132	5.773.954,85	10,35
2001	7.161.839,00	2.120.074	6.668.462,87	13,92
2002	9.795.713,00	2.123.968	7.171.205,22	9,79
2003	11.288.805,29	2.131.289	7.473.399,52	5,20
2004	10.874.598,84	2.136.999	7.821.292,24	6,24
2005	16.311.036,16	2.141.467	8.236.276,67	16,86
2006	19.178.932,83	2.146.571	8.705.996,37	6,84
2007	21.533.246,30	2.153.883	9.226.767,89	7,25
2008	24.222.730,28	2.168.732	9.783.828,13	10,63
2009	26.471.756,84	2.179.829	10.891.607,20	3,39
2010	30.841.171,43	2.332.726	11.550.549,44	7,09
2011	40.708.373,39	2.345.851	12.359.522,18	2,43
2012	55.628.583,94	2.355.283	13.250.979,79	4,49
2013	95.188.144,41	2.529.967	14.165.901,65	7,21

Sumber: BPS Kab Jember, Prov. Jawa Timur, dan DISPENDA

Lampiran 2**Hasil Data Logaritma**

LNPPD	LNPDDK	LNPDRB	INF
12.45218400574253	14.44705676523177	11.58668954942992	5.95
12.61321481325407	14.44228446859733	11.67442567074515	2.79
12.93553994234585	14.46169557753843	11.78632773968794	7.85
13.07233034118932	14.46310111582015	11.85760740952822	11.98
13.18364908888812	14.46416495238466	11.94685835966677	7.57
13.41701918176355	14.46395007957834	12.03089540720843	5.19
13.55326358661768	14.46461023513872	12.13377277623439	5.23
13.5832392249106	14.5354462020643	13.0333746212339	6.78
13.78591180492471	14.52877502219324	12.95367455911012	5.12
14.12215004768167	14.52872650687232	12.97488931594025	6.25
14.64318863148182	14.52889801513601	13.24152405922587	5.45
14.86596393318228	14.53212765270394	13.50489787035918	5.04
14.86587557507009	14.54192809103562	13.79177113444482	6.17
15.09667882039298	14.54714404745334	14.0415891338768	8.38
15.12373066856032	14.5493523649335	14.85480004395658	84.95
15.13004626205039	14.56060102162333	14.953590119131	3.16
15.50355664870342	14.55988873097104	15.56886781963859	10.35
15.78427734953358	14.56696155169938	15.71289993706028	13.92
16.09745539895249	14.5687965953171	15.78558429050013	9.78
16.23932211042022	14.57223751896677	15.82686054327919	5.20
16.20194024616668	14.57491306635546	15.87236034695137	6.24
16.60735250164124	14.57700166615932	15.92405893932907	16.86
16.76932298609059	14.57938224320198	15.97952258414047	6.84
16.88510863814157	14.58278281767447	16.03761937072245	7.25
17.00280201805956	14.58965322293105	16.09624138975986	10.63
17.0915889430624	14.59475699132169	16.20350306895987	3.39
17.24436109017927	14.66254809875698	16.26224356436341	7.09
17.5219443637487	14.66815879381709	16.32993735067051	2.43
17.83420772679311	14.67217144806422	16.3995820540777	4.49
18.37136595848774	14.74371681714037	16.46634834259195	7.21

Lampiran 3

Hasil Analisa Model Regresi

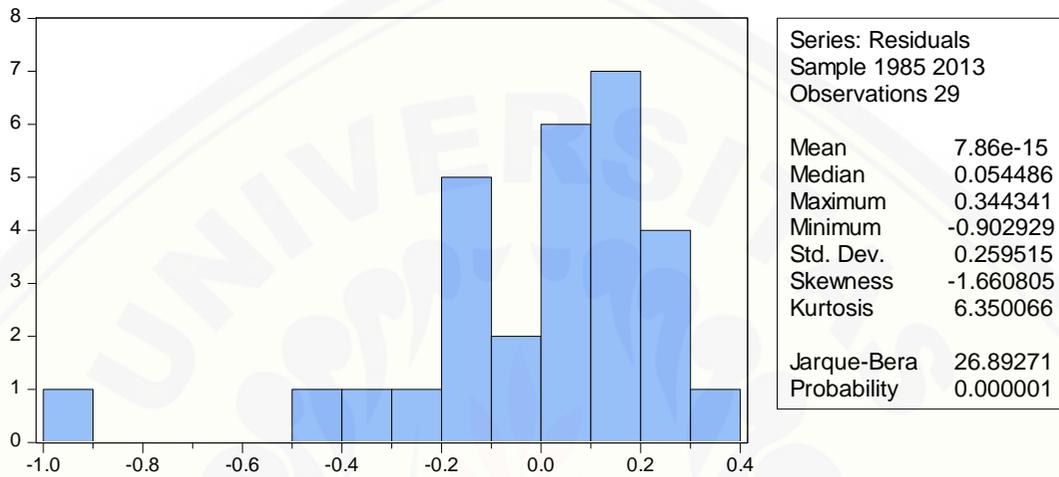
Dependent Variable: LNPPD
 Method: Least Squares
 Date: 02/18/16 Time: 23:43
 Sample (adjusted): 1985 2013
 Included observations: 29 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-48.28127	15.35562	-3.144209	0.0043
LNPDDK	6.915992	2.145789	3.223053	0.0035
LNPDRB	0.650669	0.098973	6.574203	0.0000
INF	-0.003125	0.003126	-0.999596	0.3271
R-squared	0.908137	Mean dependent var		7.928276
Adjusted R-squared	0.897114	S.D. dependent var		0.856234
S.E. of regression	0.274645	Akaike info criterion		0.380765
Sum squared resid	1.885743	Schwarz criterion		0.569358
Log likelihood	-1.521092	Hannan-Quinn criter.		0.439830
F-statistic	82.38165	Durbin-Watson stat		1.422256
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 4

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas



Hasil Uji Multikolinieritas

Dependent Variable: LNPDDK
 Method: Least Squares
 Date: 02/19/16 Time: 00:06
 Sample (adjusted): 1985 2013
 Included observations: 29 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.153207	0.040327	177.3798	0.0000
LNPDRB	0.037053	0.005387	6.878065	0.0000
INF	-0.000238	0.000282	-0.844369	0.4062

R-squared	0.645516	Mean dependent var	7.428276
Adjusted R-squared	0.618248	S.D. dependent var	0.040626
S.E. of regression	0.025101	Akaike info criterion	-4.434091
Sum squared resid	0.016382	Schwarz criterion	-4.292647
Log likelihood	67.29432	Hannan-Quinn criter.	-4.389793
F-statistic	23.67302	Durbin-Watson stat	0.770803
Prob(F-statistic)	0.000001		

Dependent Variable: LNPDRB
 Method: Least Squares
 Date: 02/19/16 Time: 00:07
 Sample (adjusted): 1985 2013
 Included observations: 29 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-121.9484	18.81075	-6.482911	0.0000
LNPDDK	17.41653	2.532184	6.878065	0.0000
INF	0.005898	0.006085	0.969193	0.3414
R-squared	0.648495	Mean dependent var		7.455862
Adjusted R-squared	0.621456	S.D. dependent var		0.884524
S.E. of regression	0.544212	Akaike info criterion		1.718740
Sum squared resid	7.700320	Schwarz criterion		1.860184
Log likelihood	-21.92173	Hannan-Quinn criter.		1.763038
F-statistic	23.98381	Durbin-Watson stat		0.475229
Prob(F-statistic)	0.000001			

Dependent Variable: INF
 Method: Least Squares
 Date: 02/19/16 Time: 00:08
 Sample (adjusted): 1985 2013
 Included observations: 29 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	793.9845	950.7393	0.835123	0.4113
LNPDDK	-112.1469	132.8174	-0.844369	0.4062
LNPDRB	5.912382	6.100315	0.969193	0.3414
R-squared	0.035372	Mean dependent var		5.008621
Adjusted R-squared	-0.038830	S.D. dependent var		16.90601
S.E. of regression	17.23112	Akaike info criterion		8.629008
Sum squared resid	7719.696	Schwarz criterion		8.770453
Log likelihood	-122.1206	Hannan-Quinn criter.		8.673307
F-statistic	0.476699	Durbin-Watson stat		2.806301
Prob(F-statistic)	0.626149			

Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.311666	Prob. F(2,23)	0.2888
Obs*R-squared	2.969038	Prob. Chi-Square(2)	0.2266

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 02/19/16 Time: 21:39

Sample: 1985 2013

Included observations: 29

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.436855	16.04756	0.214167	0.8323
PDDK	-0.474925	2.241565	-0.211872	0.8341
PDRB	0.012652	0.100810	0.125507	0.9012
INF	-0.000739	0.003123	-0.236518	0.8151
RESID(-1)	0.335029	0.212498	1.576622	0.1285
RESID(-2)	-0.152172	0.221574	-0.686778	0.4991
R-squared	0.102381	Mean dependent var		7.86E-15
Adjusted R-squared	-0.092754	S.D. dependent var		0.259515
S.E. of regression	0.271284	Akaike info criterion		0.410687
Sum squared resid	1.692679	Schwarz criterion		0.693576
Log likelihood	0.045040	Hannan-Quinn criter.		0.499284
F-statistic	0.524667	Durbin-Watson stat		1.980542
Prob(F-statistic)	0.755141			

Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	2.223185	Prob. F(9,19)	0.0683
Obs*R-squared	14.87493	Prob. Chi-Square(9)	0.0944
Scaled explained SS	29.57115	Prob. Chi-Square(9)	0.0005

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 02/19/16 Time: 21:40

Sample: 1985 2013

Included observations: 29

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	85.73870	2133.592	0.040185	0.9684
PDDK	-100.9552	600.8420	-0.168023	0.8683
PDDK^2	12.46048	42.35005	0.294226	0.7718
PDDK*PDRB	-10.41197	4.790425	-2.173497	0.0426
PDDK*INF	0.336444	0.662933	0.507508	0.6176
PDRB	71.35532	33.35778	2.139091	0.0456
PDRB^2	0.383335	0.173387	2.210865	0.0395
PDRB*INF	0.002796	0.022736	0.122968	0.9034
INF	-2.524245	4.766574	-0.529572	0.6025
INF^2	7.83E-05	0.000116	0.675184	0.5077

R-squared	0.512929	Mean dependent var	0.065026
Adjusted R-squared	0.282211	S.D. dependent var	0.153068
S.E. of regression	0.129683	Akaike info criterion	-0.980652
Sum squared resid	0.319535	Schwarz criterion	-0.509171
Log likelihood	24.21945	Hannan-Quinn criter.	-0.832990
F-statistic	2.223185	Durbin-Watson stat	2.118233
Prob(F-statistic)	0.068314		